

# KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 1614-1624

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Size* Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Helen Andaresta<sup>1\*</sup>, Khairul Aswar<sup>2</sup>, Ermawati<sup>3</sup>

Helen.andaresta@upnvj.ac.id, khoirulaswar@upnvj.ac.id, ermawati @upnvj.ac.id.

\* Penulis Korespondensi

### **Abstrak**

Penelitian ini mempunyai tujuan menguji dan membuktikan hubungan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, *size* pemerintah daerah, dan tingkat kemiskinan. Riset ini menggunakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2019. Pemilihan sampel menerapkan metode sensus sampling yakni 154 sampel pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Uji hipotesis pada riset ini adalah regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil riset ini adalah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, *Size* pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, dan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kontribusi dalam penelitian ini untuk pemerintah daerah yaitu dapat memberikan saran agar dapat terus meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, serta untuk berbagai peneliti dengan menambah variabel yang tidak ditelaah pada riset ini, dan menerapkan pengukuran lain dan teori lain pada variabel ukuran pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; *Size* Pemerintah Daerah; Tingkat kemiskinan; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### **Abstract**

*This study aims to test and prove the relationship between local government financial performance and local revenue, balance funds, local government size, and poverty levels. This study uses the Regency / City Government on the Island of Sumatera in 2019. Sampling was using the census sampling method, namely 154 samples in the Regency / City Government on the island of Sumatra. Hypothesis testing in this study is multiple linear regression with SPSS. The results of this study are that local revenue has an effect on the financial performance of local governments, the balance fund has a negative effect on the financial performance of local governments, SizeLocal government has no effect on local government financial performance, and poverty level has a negative effect on local government financial performance. The contribution in this study to local governments is to provide suggestions to continuously improve government financial performance, as well as*

*for various researchers by adding variables not examined in this study, and using other measurements and other theories in the size variable of local government.*

**Keywords:** *Local Own Revenue; Balanced Fund; Size of Local Government; Poverty Level; Regional Government Financial Performance*

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan kinerja perlu dilakukan oleh organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Kinerja sektor publik dengan swasta berbeda, untuk organisasi swasta kebanyakan pengukuran kinerja berdasarkan tingkat laba, dalam sektor publik tidak dapat mengukur dengan tingkat laba dalam menilai keberhasilan atas organisasi tersebut dikarenakan tujuan utamanya bukan mencari laba tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik.

PP No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwasanya kinerja ialah luaran/hasil dari aktivitas/program yang sudah atau akan diraih berkaitan dengan pemakaian anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. pengukuran kinerja bisa dilaksanakan melalui langkah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target (sasaran) kinerja yang dicatatkan pada berkas/lembar kontrak kinerja pada penyelenggaraan APBN/APBD tahun berjalan.

Hasil pengauditan BPK merilis pendapat terhadap pelaporan kinerja keuangan, kesimpulan dan rekomendasi kinerja layanan aktivitas program pemerintah beserta kesimpulan terhadap implementasi sistem pengendalian internal dan ketaatan pada ketentuan hukum. Berdasarkan hasil ikhtisar semester 1 tahun 2019, BPK sudah mengaudit 542 (100%) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2018. Dari kuantitas ini BPK mempublikasi pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 443 (LKPD) (82%) pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16%), serta tidak menyampaikan opini pada 13 LKPD (2%). Atas dasar tingkat pemerintah, capaian pendapat WTP sudah melewati sasaran kinerja keuangan daerah bidang penguatan pengelolaan pemerintah daerah yang diberlakukan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015-2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, laporan hasil kinerja BPK memuat kesimpulan bahwa kinerja secara umum belum sepenuhnya efektif. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek 3E (ekonomi, efisien, efektifitas). Pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah memuat enam tema pemeriksaan diantara lain: perekonomian dan finansial negara, kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, pembangunan kewilayahan, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa catatan kepala daerah terkait beberapa kelemahan yang umumnya masih dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya. Sri Mulyani menyatakan bahwa rata-rata hampir 70% anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, sehingga masyarakat di daerah kurang optimal menerima manfaat APBD karena hanya menikmati sekitar 30%. Hal ini menyebabkan timbulnya inefisiensi dalam pengelolaan APBD. Menteri keuangan membeberkan bahwa porsi belanja pegawai sebesar 36%, penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas porsinya sekitar 13,4%, dan belanja jasa kantor dapat mencapai 17,5%. Artinya, sekitar 70% APBD digunakan untuk mengurus orang-orang pemerintah daerah dan sisanya baru dikelola untuk rakyat.

Menurut Andani et al. (2019) bahwasanya pendapat audit mempunyai pengaruh positif pada kinerja pemerintah provinsi. Berdasar pada teori kontijensi struktural mengatakan bahwasanya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan konsisten pendapat WTP, oleh karenanya pemerintah provinsi wajib melaksanakan strategi organisasi demi memperoleh pendapat WTP. Aswar (2019) menyatakan bahwasanya pendapat audit menjadi hasil akhir dari audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mampu memperlihatkan pertanggungjawaban berkaitan dengan laporan yang tepat hingga akhirnya bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, *size* pemerintah daerah, terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Keagenan (Agency Theory)***

Teori Agensi menyebutkan bahwasanya relasi agensi ialah suatu perjanjian (kontrak) di antara 2 (dua) pihak, yakni agen dan prinsipal, yang mana prinsipal memberikan otoritas dan kepercayaannya kepada agen, yang mana prinsipal memberi otoritas dan kepercayaan pada agen dalam mengambil ketentuan mengatasnamakan prinsipal ( Jensen & Meckling, 1976).

### ***Teori Sinyal (Signalling Theory)***

Teori signaling yang digagas Akerlof (1970), melakukan pembahasan terkait permasalahan informasi asimetri antara berbagai pihak yang ada pada transaksi bisnis yang cenderung membawa kerugian. Teori sinyal didasari melalui asumsi bahwasanya informasi yang didapat oleh tiap-tiap pihak berbeda. teori sinyal memberikan sinyal dimana pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh penerima informasi, pihak menerima kemudian menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahaman atas sinyal tersebut (Spence, 1973).

### ***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dipungut dari daerah tersebut menurut undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi daerah pajak daerah, dan lain-lainnya pendapatan yang sah. Teori keagenan dalam pendaptan asli daerah dimana masyarakat memberikan sumber pendanaan kepada pemerintah daerah berupa retribusi daerah dan pajak daerah, pemerintah daerah selaku agen melakukan tanggung jawab dalam mengelola keuangannya yang bersumber dari masyarakat tersebut untuk mendorong kegiatan agar tercapainya tujuan organisasi, masyarakat dapat melakukan kontrol atas tata kelola keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah, pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan yang baik maka hal tersebut dapat mencerminkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah pada pembiayaan pembangunan dan bisnis regional guna meminimalkan ketergantungan atas biaya dari pemerintah pusat. Hal tersebut selaras menurut riset yang dilaksanakan oleh Aswar (2019) dan Awwaliyah et al. (2019) bahwasanya pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama ialah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### ***Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***

Dana perimbangan merupakan biaya yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah yang hendak digunakan untuk membiayai aktivitas daerah tersebut agar tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Teori keagenan dalam dana perimbangan dimana pemerintah daerah selaku agen dan pemerintah pusat sebagai prinsipal, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan atas dana yang diterima, dan pemerintah daerah perlu melakukan bentuk tanggung jawab atas wewenang tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan pelayanan publik yang optimal dan merata.

Oleh karenanya hal ini bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, hal ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Andirfa et al. (2016) dan Awwaliyah et al. (2019) mengatakan bahwasanya dana perimbangan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasar pada penjelasan tersebut maka hipotesis kedua ialah:  
H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### ***Pengaruh Size Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***

*Size* pemerintah daerah untuk menentukan besar atau kecilnya suatu daerah tersebut. Ukuran ini bisa dilihat dari kuantitas penduduk, dimana setiap kota/kabupaten memiliki jumlah penduduk dan anggarannya yang beda maka semakin tinggi jumlah penduduk akan membuat tuntutan keterbukaan informasi yang relevan terkait dengan pelaporan keuangan yang dibuat, pelaporan keuangan yang baik menandakan bahwasanya organisasi telah berjalan dengan baik (Sukarmi & Budiasih, 2016)

Pemerintah daerah memberikan sinyal-sinyal baik untuk masyarakat sehingga akan membuat masyarakat mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dibutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai dalam memberi layanan pada publik. Dengan begitu, Jumlah penduduk yang tinggi akan membuat peningkatan kinerja pemerintah daerah (Mulyani & Wibowo, 2017).

Hal ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Dewata et al. (2017) dan Anggraini et al. (2019) bahwasanya ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari pernyataan tersebut maka hipotesis ketiga berupa:  
H3 : *Size* Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### ***Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***

Pendapat Friedman disebutkan bahwasanya kemiskinan terjadi karena faktor ketimpangan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, yang terdiri dari modal atau aset produktif dan sumber daya keuangan. Dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah selalu didorong meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi akan mendorong meluasnya kegiatan ekonomi yang diharapkan mengundang investasi swasta, sehingga meningkat kapasitas produksi jasa dan barang pada berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang akan semakin maju mengurangi tingkat kemiskinan daerah.

Kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan pendapatan, ialah ukuran berhasil tidaknya suatu pembangunan (Todaro, 2003). Riadi (2010) mengatakan bahwasanya sebagai indikator pembangunan ialah indikator kemiskinan, kesempatan kerja, pemerataan, dan indikator ekonomi makro.

Tingkat kemiskinan sesuai dengan teori sinyal karena pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat dan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ini tergantung pada bagaimana pemerintah daerah bisa memberi pembiayaan yang baik dalam pembangunan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Syamsudin et al. (2016), Astuti (2018) bahwasanya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tingginya kinerja keuangan daerah yang baik akan mendorong peningkatan kemakmuran publik. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan hipotesis kelima ialah.

H4 : Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera yang terdiri dari 120 Kabupaten dan 34 Kota pada tahun anggaran 2019. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus sampling yang menghasilkan 154 sampel yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota selama 2019, namun setelah dilakukan data outlier maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 137 sampel. Hipotesis di uji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat efisiensi yang diadopsi dari penelitian (Mulyani & Wibowo, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dengan Menggunakan total realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan diukur dengan menggunakan total realisasi dana perimbangan, *size* pemerintah daerah diukur menggunakan total pendapatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan diukur dengan menggunakan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Deskriptif*

Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimaksud pada riset ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari tingkat efisiensi, semakin kecilnya nilai efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus kemudian sebaliknya semakin besar nilai efisiensi artinya kinerja keuangan pemerintah daerah buruk. Pada riset ini data yang dipakai tahun 2019 dari 120 pemerintah kabupaten dan 34 pemerintah, dengan jumlah 154 Kota/Kabupaten di Pulau Sumatera. Hasil kinerja keuangan pemerintah daerah didapatkan dari perbandingan realisasi pengeluaran/Belanja dibandingkan dengan realisasi penerimaan/Pendapatan.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	137	69,53	104,53	86,3155	8,17538
Valid N (listwise)	137				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 tersebut, bisa dipahami sampel yang digunakan sejumlah 137 (setelah *outlier*) kabupaten/Kota dengan penelitian tahun 2019. Deskriptif diatas menggambarkan rata-rata tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera adalah 86,32% , yang artinya rata-rata kinerja keuangan pada Kota/Kabupaten di Pulau Sumatera dikatakan baik dilihat nilai efisiensi, Rasio ini merupakan alat analisis yang bermanfaat dalam menghitung efisiensi biaya pengeluaran (Mulyani & Wibowo 2017).

Nilai *minimum* sebesar 69,53 yang artinya rasio efisiensi terendah berada pada Kabupaten Lahat tahun 2019 sehingga dikatakan bahwa kinerjanya baik. Nilai *maximum* sebanyak 104,53 yang berarti bahwasanya nilai rasio tertinggi berada pada Kabupaten Tanjungpinang tahun 2019 sehingga dikatakan kinerja keuangan pemerintah buruk dikarenakan tingkat efisiensi melebihi 100% .

**Uji Signifikansi Individual (Uji t)**

Uji statistik t dipakai guna memahami apakah variabel berupa dana perimbangan, *size* pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan tingkat kemiskinan yang digunakan dapat mempunyai pengaruh pada variabel independen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	348,397	91,601		3,803	0,000
Pendapatan Asli Daerah	5,056	1,369	0,360	3,692	0,000
Dana Perimbangan	-12,236	2,847	-0,504	-4,298	0,000
Size Pemerintah Daerah	-3,157	2,133	-0,150	-1,480	0,141
Tingkat Kemiskinan	-47,838	14,358	-0,262	-3,332	0,001

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Pengujian pada pendapatan asli daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Telah dilakukan uji statistik, hasil yang diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,692 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan nilai yang diperoleh maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pendapatan asli daerah mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil riset ini tidak selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Andirfa (2016) dan Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswar (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dimana pendapatan daerah ini ialah salah satu komponen kekayaan yang dimiliki oleh daerah dan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan dikarenakan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan mereka secara efisien. artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan, hal tersebut selaras dengan teori yang digunakan oleh riset ini yaitu *agency theory* dimana pendapatan asli daerah ini adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat ataupun *stakeholder* kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah perlu bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan secara efisien guna mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pengujian pada pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Telah dilakukan uji statistik, hasil yang diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -4,298 sedangkan dan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan nilai yang diperoleh maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya dana perimbangan mempunyai signifikansi negatif pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil riset ini tidak selaras dengan riset yang dilaksanakan oleh Natoen et al. (2019) yang meneliti pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, menyatakan bahwa dana perimbangan tidak mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitiannya percaya bahwa tidak adanya pengaruh dana perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal penggunaan dana yang diberikan oleh daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya daerah yang mempunyai dana perimbangan besar memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pusat. Hal tersebut sejalan juga dengan teori yang digunakan yaitu *agency theory* bahwa pemerintah daerah perlu melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa dana telah diterima dan dikelola secara baik

sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pengujian pada pengaruh *size* pemerintah daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Telah dilakukan pengujian statistik, hasil yang diperoleh  $t_{hitung}$  sebanyak -1,480 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,141. Berdasarkan nilai yang diperoleh maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) yang menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Dewata et al. (2017) yang menjelaskan bahwa *size* pemerintah daerah tidak mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. serta tidak sesuai dengan teori sinyal (*Signalling Theory*). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pemerintah daerah yang diukur menggunakan jumlah penduduk dan anggaran pendapatan pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera belum bisa dinyatakan menjadi faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan serta penduduk yang rendah belum tentu juga kinerja keuangannya tidak baik, karena pemerintah dengan jumlah penduduk yang kecil perlu juga mendorong peningkatan layanan publik. Riset ini tidak selaras dengan teori sinyal, dimana pemerintah harus memberikan sinyal kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangannya, dikarenakan masyarakat lebih fokus pada *impact* langsung atau hasil kerja yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengujian pada tingkat kemiskinan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Telah dilaksanakan uji statistik, hasil yang diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -3,332 sedangkan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Berdasarkan nilai yang diperoleh maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti belanja modal mempunyai signifikansi negative pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Syamsudin et al. (2019) yang mengatakan bahwasanya tingkat kemiskinan tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Riset ini selaras dengan yang dilaksanakan oleh Astuti (2018) dimana tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta selaras dengan teori sinyal (*Signalling Theory*) yang digunakan. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang mencakup semua kebutuhan masyarakat dan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ini tergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan pembiayaan yang baik untuk pembangunan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah memberikan sinyal kepada masyarakat mengenai pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang kemudian dinikmati langsung oleh publik sehingga dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Sesuai hasil analisis yang sudah diperoleh riset ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, *size* pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu membuktikan bahwa semakin besar atau kecilnya pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

- b. Dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu membuktikan bahwasanya semakin besar atau kecilnya dana perimbangan maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. *Size* pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu membuktikan bahwa semakin besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah maka tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu membuktikan bahwasanya semakin besar atau kecilnya Tinggi kemiskinan maka akan memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN**

Riset ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sebagai berikut: 1) pada hasil riset ini dimana belum mampu memberikan gambaran lebih jelas dan luas atau generalisasikan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah, dikarenakan data yang di outlier cukup banyak. 2) penelitian ini bersifat *cross section* yaitu hanya diteliti dalam satu waktu yang terbatas dan hanya untuk membuktikan kondisi yang terjadi pada waktu penelitian.

Atas dasar keterbatasan pada riset ini, maka periset memberi saran kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya lagi, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa ketergantungan dari biaya dari pemerintah pusat untuk membiayai segala kegiatan operasional serta meningkatkan pelayanan publik yang merata. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian agar bisa tergeneralisasikan, serta menggunakan teori lain seperti teori stakeholder dan pengukuran lainnya selain yang dipakai pada riset ini khususnya di variabel *size* pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M (2015). Metodologi penelitian kuantitatif. Yogyakarta:Aswaja
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019>
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan)*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137>
- Aminah Nur, D. (2019). Pengaruh size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan*, 3(2), 147–165.
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Armaja, Ibrahim, R., dan A. (2015). Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Aswar, K. (2019). Financial performance of local governments in indonesia. *European Journal of Business & Management Research*, 4(6), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting & Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Aziz, A. (2016a). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ( studi pada pemerintah daerah kabupaten / kota di jawa timur ). *Ejournal.Stiedewantara*, XI(1), 86–101.
- Aziz, A. (2016b). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa timur). *Eksis*, 11(1), 86–101. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta:Erlangga
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD. Salemba Empat.
- Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen BISNIS*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in indonesian local governments. *European Journal of Business & Management Research*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Fatimah, H. R. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku*. 13(1), 39–56.
- Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta Selatan: Salemba Halim, A.& kusufi, M.S (2012). AKuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2016). Teori akuntansi. Edisi revisi 2011. PT Raja Grafindo PersadaEmpat.
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The effect of fiscal stress, original local government revenue and capital expenditures on efficiency ratio of government independence performance. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 12(1), 18–25. <https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018>
- Harjito, Y., Surya, G. P., & Yulianto, N. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan

- kota. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten & Kota Di Indonesia*, 5(1), 19–28.
- Untung, J. Widyastuti, T. & Suyanto. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, terhadap belanja daerah dan dana bagi hasil sebagai pemoderasi pemerintah kabupaten / kota di provinsi Jawa Barat periode tahun 2010-2014. 1.
- Izudin, H., & M, S. S. H. (2013). *Silpa di kabupaten Bungo*. 1(1), 35–42.
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>
- Leki, Y. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Lia Anggraini, Sri Rahayu, J. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jambi). 7, 45–56.
- Lucky, D. (2013). Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics & Sustainable Development*, 4(19), 7–18.
- Mahardika, P., & Saputra, A. (2019). Decentralization and Financial Local Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending, Economic Growth, and Poverty in East Java Indonesia? *Journal of Poverty, Investment & Development*, November 2019. <https://doi.org/10.7176/jpid/51-04>
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015). *XV(1)*, 57–66.
- Natoen.dkk. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten / kota di Sumatera Selatan ( studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten / kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017 ). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah tahun 2013. Jakarta
- Peraturan Pemerintah (2019). Peraturan Pemerintah 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jakarta
- Peraturan pemerintah. (2017). Peraturan pemerintah 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Jakarta
- Peraturan pemerintah. (2005). Peraturan pemerintah 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Jakarta
- Peraturan pemerintah. (2010). Peraturan pemerintah 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Jakarta
- Undang-undang. (2004). Undang undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta
- Sukarmi, N. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 545–572.
- Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, otonomi fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah: studi pada provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 144–154. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671>
- Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Verawaty. (2017). Determinan transparansi informasi keuangan daerah melalui e-government pemerintah daerah di Sumatera Selatan. *Jurnal Akuisisi*, 13(2), 92–107.